



ANOMALI POLITIK MEDIA PEMBERITAAN POLRI VERSUS KEJAKSAAN AGUNG (STUDI KASUS PEMBERITAAN PERISTIWA INTERVENSI DENSUS 88 POLRI PADA JAMPIDSUS DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI DI KEJAKSAAN AGUNG)

Slamet Budiharjo¹, Algooth Putranto^{2*}

1, 2 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya

ABSTRACT

In today's digital era, where everything moves and changes rapidly, the media in its journalistic work, is under demands that it must be able to provide information about events or occurrences as quickly as possible. The digitalization of conventional media opens up the possibility of media convergence which will impact not only the media industry but also changes in media consumption patterns, public perception, information dissemination, and media literacy. The incident of stalking of the Deputy Attorney General for Special Crimes (Jampidsus) carried out by members of Counterterrorism Special Detachment 88 Indonesian National Police was revealed by the media who were unable to fully explain the background and how the incident occurred. Tribunnews.com has footage, but the media did not publish the news related to this incident because of difficulties for the media to carry out verification. This research highlights reporting by Kompas.com and Tribunnews.com, two online media that are members of the Kompas Gramedia Media Group, using descriptive qualitative research methods with an approach to media political theory and media management related to reporting on the feud between the Attorney General's Office and the National Police.

Keywords: feuds, attorney general, police, media, corruption

1. PENDAHULUAN

Akhir Mei 2024, media nasional marak memberitakan peristiwa tindakan penguntitan dan perekaman jarak jauh yang dilakukan anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88) terhadap Febrie Adriansyah, seorang Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, ketika itu Febrie sedang berada di sebuah restoran untuk makan malam di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Saat itu Febrie dikawal oleh satu ajudan dan motor patwal Polisi Militer. Tindakan Densus 88 tersebut diketahui oleh Polisi Militer (PM) yang bertugas mengawal Febrie dan berhasil menangkap salah satu penguntit bernama Bripda IM (Nababan, W. M, C. dan Rahayu, K.Y., 2024). Diketahui saat itu Febrie tengah memimpin penyelidikan kasus terkait adanya dugaan pidana korupsi yang terjadi pada tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Bangka Belitung. Kasus yang sedang ditangani saat ini sedang menjadi perhatian publik karena ada 21 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan nilai kerusakan akibat kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp271 triliun (Setuningsih, N., 2024). Selain itu, Jampidsus diketahui juga

*Algooth Putranto
E-mail: algooth.putranto@upi.ac.id

sedang menangani kasus korupsi penyediaan infrastruktur *base transceiver station* (BTS) 4G yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Buntut dari peristiwa tersebut, Korps Adhyaksa menaikkan level pengamanan dalam menjaga area Gedung Kejaksaan Agung dengan melibatkan personel Polisi Militer. Berdasarkan pada *Memorandum of Understanding* (MoU) yang disepakati oleh kedua institusi negara tersebut yang mendasari pelibatan personel Polisi Militer dalam tugas pengamanan serta dukungan dari personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diperbantukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan (Yahya, A. N., 2024). Pelibatan Polisi Militer termuat dalam nota kesepahaman pada Pasal 9 Nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor NK/IV/2023/TNI pada 6 April 2023. Namun pengamanan yang dilakukan oleh Polisi Militer tersebut sebenarnya sudah berlangsung lama sebagai upaya mendukung penegakan hukum dan dalam lingkungan Kejaksaan Agung terdapat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil). Jampidmil merupakan unsur pembantu pimpinan yang memiliki tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana militer, dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Perseteruan maupun intimidasi antarlembaga negara khususnya Polri bukan hanya terjadi kali ini saja, misalnya perseteruan yang terjadi antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Polri dan TNI (Chaterine, R. N. & Krisiandi, 2022; Wardhani, I. S., 2015). Rivalitas KPK dan Polri menunjukkan agenda pemberantasan korupsi begitu rentan terhadap kooptasi kepentingan politik yang menyandera kedua lembaga tersebut. Proses hukum pemberantasan korupsi yang seringkali dimanfaatkan sebagai alat kepentingan politik. KPK selama ini memiliki citra yang jauh lebih positif daripada kepolisian. Sedangkan konflik yang terjadi antara TNI dan Polri biasanya lebih disebabkan karena terjadi kesalahpahaman dan ketersinggungan.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK dan Polri, mengutip laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2022 (Saptohutomo, A. P., 2023). Dalam laporan disebutkan kejaksaan telah menangani sejumlah 405 kasus dengan 909 tersangka dan menyebabkan kerugian negara Rp 39 triliun. KPK mengusut 36 kasus dengan 150 tersangka dan merugikan negara sebesar Rp 2,2 triliun, sedangkan kepolisian menangani sejumlah 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka dan kerugian negara senilai Rp 1,3 triliun.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Lembaga ini dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia (Putri, V. K. M. & Gischa, S., 2021; Sasongko, A. K., 2022). Kejaksaan Agung memegang kekuasaan yang signifikan dalam penuntutan dan administrasi kekuasaan negara, dengan tugas meliputi penegakan hukum, perlindungan kepentingan publik, penegakan bagi hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Meskipun begitu, Kejaksaan Agung tidak lepas dari kasus terkait korupsi. Salah satunya, pada 30 Juli 2020 Pinangki Sirna Malasari atau lebih dikenal sebagai Jaksa Pinangki dibebastugaskan sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, kemudian ditangkap oleh tim penyidik Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung pada 11 Agustus 2020 (Dzulfaroh, A. N. & Hardiyanto, S., 2021). Jaksa Pinangki bersalah dalam kasus tindak pidana suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat dalam perkara terpidana kasus Djoko Tjandra, buronan kasus skandal Bank Bali yang kemudian berhasil ditangkap di Malaysia pada Juli 2020. Meskipun Jaksa Pinangki

telah diputuskan bersalah dan telah divonis penjara sejak 5 Juli 2021, namun hasil putusan tersebut tak langsung dieksekusi jaksa. Menurut Bonyamin, koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) yang menganggap kejaksaan mempertontonkan keistimewaan yang didapatkan Jaksa Pinangki. Salah satunya adalah selama menjalani proses hukum yang telah berlangsung sejak Agustus 2020, Jaksa Pinangki yang telah diberhentikan sementara dari jabatannya masih menerima 50 persen gaji.

Setahun kemudian kasus Djoko Tjandra menyeret dua petinggi Polri, Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Kepala Biro (Karo) Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo dalam kasus penghapusan *Red Notice* yang berujung vonis hukuman 4 tahun penjara dan ditambah denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara bagi Napoleon Bonaparte. Sedangkan Prasetijo, divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan (Kompas, 2021).

Dalam jurnal *Covering cops: Critical reporting of Indonesian police corruption* (Davies, S., et al., 2016) berfokus pada bagaimana *The Jakarta Post* melaporkan korupsi polisi di Indonesia, dan menekankan sifat korupsi yang tersebar luas pada kepolisian. Penelitian dalam jurnal tersebut menggunakan teori *Cultural Constraints Theory of Police Corruption* dengan metode analisis konten kuantitatif untuk memeriksa detail spesifik artikel, dan kualitatif digunakan untuk mengembangkan dan memeriksa tema yang sering muncul dalam teks. Surat kabar ini secara kritis mengkaji penyebab dan dampak korupsi di kepolisian serta menyoroti perlunya jurnalisme investigatif untuk menginspirasi reformasi dan memerangi korupsi sistematis yang terjadi secara efektif. Selain itu, media memainkan peran penting dalam melawan korupsi di kepolisian dengan melaporkan berbagai bentuk korupsi, mendiskusikan penyebab korupsi, dan menyoroti upaya untuk memerangi korupsi di kepolisian.

Media memberikan transparansi dan pengawasan eksternal terhadap penyelidikan polisi, meminta pertanggungjawaban polisi atas tindakan mereka serta mempengaruhi persepsi publik tentang korupsi dan penegakan hukum. Sedangkan dalam jurnal *The Save KPK Movement: A Framing Analysis of Coverage In Indonesian News Media Surrounding The KPK And Police Dispute* (Jamil, A., & Doktoralina, C. M., 2016) menggali bagaimana surat kabar Indonesia yaitu Kompas dan Media Indonesia dalam membingkai gerakan "Save KPK" yang muncul dari konflik antara KPK dan Kepolisian. Kedua surat kabar tersebut berfokus pada konflik dalam pemberitaannya, di mana *Media Indonesia* sebagian besar menggunakan aparat kepolisian sebagai sumber berita, di sisi lain *Kompas* lebih mengandalkan masyarakat sipil. Penelitian ini menekankan bahwa peran media dalam membentuk persepsi publik mengenai isu korupsi di Indonesia, menekankan dampak pembingkai seperti konflik, moralitas, dan tanggung jawab dalam peliputan gerakan nasional. Penelitian pada jurnal tersebut menggunakan teori analisis *framing* dan analisis isi dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis cakupan media terhadap gerakan "Save KPK".

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana media memberitakan kasus-kasus korupsi yang menimpa lembaga negara dalam hal ini Kejaksaan Agung dan Polri dalam penanganan kasus penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dengan memahami politik media dan manajemen media. Media memiliki andil dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi kepada publik sehingga informasi dapat diterima atau disampaikan dengan cepat dan luas. Media menjadi

jembatan antara peristiwa yang terjadi dengan masyarakat yang membutuhkan informasi.

Media memainkan peran penting dalam menyampaikan berita terkait suatu peristiwa yang terjadi. Teks berita tidak dipahami sebagai sebuah tulisan semata, namun teks berita dapat berisi segala peristiwa dan informasi dalam berbagai media, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan lain sebagainya (Megayatma, A. D. & Pratiwi, D. R., 2022). Dalam teks berita terdiri dari orientasi berita (pengenalan masalah), peristiwa (deskripsi kejadian secara rinci dan berurutan), dan juga sumber berita dalam hal ini penyedia informasi terkait dari berita tersebut. Sumber berita harus melibatkan media informasi yang relevan, menjadi penting dalam kaitannya untuk menjaga kredibilitas dan transparansi dalam jurnalisme. Teks berita memiliki tujuan untuk menginformasikan kepada audiens secara efektif dengan tetap mempertahankan kaidah-kaidah jurnalistik dan integritas dengan tetap berpegang teguh pada nilai berita.

Teori politik media dipahami sebagai suatu pendekatan yang mempelajari bagaimana media mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem politik dan proses politik dalam suatu masyarakat. Berangkat dari asumsi bahwa media massa memiliki kemampuan mempengaruhi bagaimana orang berpikir dan bersikap dalam konteks politik. Dalam ranah politik media terdapat tiga aktor kunci yang berinteraksi, yaitu politisi, jurnalis, dan individu yang dimotivasi oleh kepentingan khusus (Ihlebaek, K. A. & Figenschou, T. U., 2023). Aktor-aktor tersebut memainkan peran yang berbeda dalam membentuk lanskap komunikasi politik dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Politisi memanfaatkan platform media untuk menyampaikan pesan mereka, mempengaruhi opini publik, dan memajukan agenda mereka. jurnalis bertindak sebagai mediator antara politisi dan publik, membingkai narasi politik dan membentuk wacana seputar isu-isu penting (Dwinarko, et al., 2023; Baugut, P., 2019)). Sedangkan yang dimaksud individu dengan kepentingan tertentu, yaitu individu yang dapat mempengaruhi hasil politik maupun media. Dengan memahami interaksi dan dinamika kekuasaan di antara para aktor ini sangat penting untuk memahami bagaimana arus informasi, narasi dibangun, dan sebuah keputusan dibuat dalam ekosistem yang kompleks dalam politik media.

Media memiliki peran yang penting dalam proses demokratisasi karena media mampu menyampaikan informasi secara luas dengan menjadi penghubung antara sumber informasi dan publik. Media bekerja dalam sebuah serangkaian proses yang saling terkait yang disebut dengan manajemen media. Manajemen media adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian semua aspek yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi konten media. Tujuan dari manajemen media adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia mampu dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk dapat mencapai tujuan dengan apa yang telah ditetapkan oleh organisasi media.

Beberapa teori yang berkaitan dengan manajemen media, antara lain adalah teori *Agenda Setting* yang menjelaskan bahwa media mempunyai kemampuan untuk menentukan topik apa yang dianggap penting oleh publik dengan memberi fokus pada topik tertentu (Hao, X. 2022). Teori *Agenda Setting* pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972 (ASSURED-UAM, Project., 2022). Dalam manajemen media dikenal juga teori *Framing* yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana media mempengaruhi pandangan dan pemahaman publik terhadap suatu isu melalui cara penyajian informasi yang dapat mempengaruhi opini dan perilaku publik (Guran, M. S., & Ozarslan, H., 2022). Teori *Framing* diperkenalkan oleh Erving Goffman

pada tahun 1974. Sedangkan teori yang berfokus pada pemahaman bagaimana individu menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan kepuasan tertentu terhadap media dikenal dengan teori *Uses and Gratification* (Salubi, O. G. & Muchaonyerwa, N., 2018). Teori yang dikembangkan oleh Katz, Blumler, dan Gurevitch sekitar tahun 1974 ini menyatakan bahwa audiens aktif dalam memilih media untuk memenuhi kebutuhannya terkait informasi, hiburan, interaksi sosial, dan sebagainya (Kasirye, F., 2021). Selain itu, dikenal juga teori *Social Responsibility* yang dikembangkan oleh Komisi Kebebasan Pers di Amerika Serikat pada tahun 1947. Teori ini menyatakan bahwa media memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat untuk dapat menyediakan informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan (García, J. A. G. & Agudelo, C. A. M., 2023).

Teori politik media berfokus pada pengaruh kekuasaan dan politik dalam produksi dan distribusi konten media. Analisis yang dilakukan untuk melihat bagaimana media mempengaruhi opini publik dan proses politik dengan memperhatikan pada hubungan antara media dan struktur sosial-politik yang lebih luas. Sedangkan teori manajemen media menitikberatkan pada bagaimana proses dan strategi yang dilakukan dibalik operasi media dan pengambilan keputusan. Analisis pada manajemen media lebih terkait dengan efisiensi operasional, strategi bisnis, dan inovasi teknologi dalam media. Selain itu, aspek internal yang berhubungan dengan organisasi ruang redaksi (*newsroom*), investasi teknologi, dan budaya kerja.

Perkembangan teknologi juga memberikan dampak kepada media misalnya terkait produksi dan manajemen media konvensional. Dampak yang dialami oleh media konvensional terhadap digitalisasi media antara lain, terjadinya pola konsumsi media oleh masyarakat yang lebih cenderung memilih media digital dan mulai meninggalkan media konvensional dengan ditandai makin menurunnya jumlah oplah penjualan media konvensional (Alzubi, A. M., 2022). Digitalisasi memungkinkan konvergensi media dari berbagai bentuk media konvensional seperti cetak, siaran, dan audio visual beradaptasi dengan format digital yang menyediakan aspek kecepatan informasi dan tersedia lebih banyak pilihan media melalui berbagai platform digital dan didukung kecepatan internet yang makin tinggi. Transformasi dari media konvensional menjadi digital juga mengubah profesionalisme dan kredibilitas jurnalis menghadirkan tantangan baru berupa kredibilitas dan validas informasi terkait verifikasi data karena tuntutan kecepatan informasi (McLachlan, K., 2022).

2. METODE

Penelitian berikut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang mempengaruhi manajemen media dan dinamika politik media dengan menggunakan pendekatan teori politik media dan manajemen media (Harutyunyan, R., 2022). Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait persepsi, pengalaman, dan pendapat dari narasumber terkait subjek penelitian. Dalam metode ini data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis teks untuk dapat memahami bagaimana teori politik media dan manajemen media dipraktikkan dalam situasi yang kompleks dan dinamis. Wawancara untuk mendapatkan data bisa dilakukan dengan jurnalis, politisi, ataupun pengelola media terkait produksi dan penyebaran informasi di media serta menunjukkan bagaimana strategi media dalam mempengaruhi wacana yang disajikan kepada publik (Tsang, E. P. K., 2023).

Penelitian ini akan berfokus kepada pemberitaan terkait perseteruan Kejaksaan Agung dengan kepolisian Republik Indonesia yang dimuat pasca penangkapan salah seorang terduga anggota Detasemen Khusus Anti Teror Polri (Densus 88) yang dimuat oleh media *Tribunnews.com* dan *Kompas.com* pada 19 Mei 2024. Pemilihan kedua media online tersebut karena jaringan kedua media tersebut cukup luas sebagai media nasional yang tergabung dalam Kompas Gramedia Group. Selain itu, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan teori politik media dan manajemen media akan dianalisis bagaimana produksi media dan manajemen media tersebut bekerja dalam perspektif konvergensi media.

Analisis data pada penelitian kualitatif berupa proses menganalisis, menggambarkan, mencatat dan meringkas informasi yang diperoleh dengan tujuan untuk dapat menggambarkan secara jelas dan mendalam terkait peristiwa yang diteliti. Karakteristik pada penelitian kualitatif terletak pada cara analisis data yang dilakukan secara induktif (Ponce, O. A., et al., 2022). Dalam konteks penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan pendekatan induktif adalah proses berpikir dari pengamatan spesifik bergerak ke umum atau general dan teori yang lebih luas. Peneliti melakukan observasi detail kemudian mengembangkan teori yang lebih umum berdasarkan pada data yang telah diperoleh. Perlu diperhatikan dalam pendekatan induktif dalam penelitian kualitatif adalah melakukan pengamatan spesifik dan mendetail terhadap peristiwa atau fenomena yang akan diteliti, kemudian melakukan pencarian pola atau tema dari fenomena tersebut. Berdasarkan pola atau tema yang ditemukan kemudian peneliti mengembangkan penjelasan dan teori yang digunakan untuk melihat subjek penelitian yang lebih luas melalui generalisasi.

Pendekatan induktif memungkinkan fleksibilitas dalam penelitian karena teori dikembangkan setelah data terkumpul. Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif menekankan pada menemukan makna dari data yang ada. Pendekatan induktif memungkinkan peneliti untuk tetap terbuka terhadap data yang ada dan tidak dibatasi oleh teori dan hipotesis publik (Tsang, E. P. K., 2023). Hal ini membantu peneliti dalam mengungkap pemahaman yang lebih mendalam terkait pengalaman dan perspektif pada subjek penelitian.

Data dalam penelitian kualitatif berikut ini diperoleh melalui wawancara, observasi dari pemberitaan terkait dengan penelitian, dokumen berupa jurnal dan publikasi yang mendukung (Tsang, E. P. K., 2023). Metode tersebut berguna untuk mengeksplorasi fenomena kompleks yang terjadi. Peneliti menginterpretasi data melalui analisis dan verifikasi untuk melihat kembali temuan data menggunakan triangulasi dengan sumber data lain. Dengan melakukan triangulasi, data yang diperoleh dapat diminimalisir bias dan subjektivitas peneliti sehingga dapat meningkatkan kepercayaan, kebenaran, dan kredibilitas hasil temuan mengingat seringkali pada metode penelitian kualitatif, seorang peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media memainkan peran penting dalam memperkuat partisipasi politik masyarakat, terutama dalam era digital seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat kehadiran media digital menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari yang memungkinkan orang mudah mengakses, berbagi dan mengosumsi informasi dengan cara yang cepat dan lebih efisien. Teknologi *smartphone* dengan segala kecanggihannya membuat dunia dalam genggaman

dengan didukung internet dengan kecepatan tinggi serta munculnya jenis media baru yang dikenal dengan sebutan media digital.

Digitalisasi media massa memberikan tantangan sendiri, selain kecepatan informasi dan mudahnya akses media tersebut dalam menjangkau audiens, namun hal-hal yang terkait dalam produksi liputan tetap harus menjaga kaidah-kaidah jurnalistik. Proses pembuatan liputan jurnalistik melibatkan berbagai tahapan yang kompleks, mulai dari pengumpulan data hingga penyajian cerita yang menarik dan informatif (Portilla, I., 2018). Proses dalam pengumpulan data dan informasi sumber berita perlu dinilai kredibilitasnya, perlu dilakukan *cross-checking* untuk membandingkan informasi yang diperoleh dengan informasi dari sumber lainnya dan perlunya memastikan fakta yang disampaikan adalah akurat dan benar adanya (Abrar, M. F., 2023). Verifikasi dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terkait kebenaran sebuah informasi dan untuk menjaga akuntabilitas bahwa jurnalis dan media bertanggung jawab atas informasi yang mereka sampaikan. Kualitas jurnalisme juga ditentukan oleh proses verifikasi yang ketat dan dipastikan bahwa jurnalisme bukan sekadar pemberitaan namun bisa menjadi sumber informasi. Dalam praktiknya proses verifikasi tidak selalu mudah, karena jurnalis sering berhadapan dengan batasan waktu dan sumber daya. Meskipun begitu, verifikasi tetap menjadi prioritas utama dalam jurnalisme sebagai upaya menjaga integritas profesi dan kepercayaan yang diberikan oleh publik.

Kompas sebagai media yang sudah memasuki era digital sejak 14 September 1995, meskipun pengumuman resminya terkait hadirnya Kompas Online (PT Kompas Cyber Media/KCM) baru dilakukan pada tanggal 22 Oktober 1995 melalui salah satu artikelnya "Kompas Online: Informasi Masa Depan" (Kompas.com, 2017). Sejak awal berdirinya pada tanggal 28 Juni 1965, harian Kompas berfokus pada pemberitaan yang tidak hanya akurat, namun juga berkualitas tinggi, dengan motto "Independen, Berintegritas" dan slogan "Amanat Hati Nurani Rakyat". Kompas memposisikan diri sebagai media yang tidak memiliki keterikatan dengan kepentingan politik tertentu, sehingga Kompas menjadi pilihan bagi yang menginginkan informasi yang objektif dan mendalam. Harian Kompas yang hadir dalam bentuk daring bisa diakses melalui Kompas.id yang dikelola oleh PT Kompas Media Nusantara (Besman, A., et al., 2023). Kompas.id menampilkan konten surat kabar harian Kompas dalam format koran berupa teks dan gambar. Berbeda dengan koran Kompas dan Kompas.id, Kompas.com merupakan portal web yang berisi berita dan artikel online yang dikelola KCM.com. Sementara Tribunnews.com, dikelola PT Tribun Digital Online, adalah portal berita online dengan jaringan kanal berita daerah terbesar di Indonesia dengan 23 kanal berita online, sedangkan koran Tribun terbit di 21 kota dengan 22 unit koran daerah. Tribun dan Tribunnews.com tergabung dalam kelompok penerbitan koran regional Kompas Gramedia (Khadziq, 2016).

Berdasarkan data dari situs Semrush.com yang diakses pada tanggal 7 Juni 2024 Kompas.com menempati posisi nomor delapan website paling banyak dikunjungi, data hingga bulan April 2024 (Semrush.com, 2024). Sedangkan menurut situs Scimagomedia.com yang diakses pada 7 Juni 2024 Kompas.com menempati rangking nomor satu media online di Indonesia, dan menempati posisi nomor empat rangking secara global (Scimagomedia.com, 2024). Tribunnews.com berada pada posisi nomor tiga belas berdasarkan situs Semrush.com, sedangkan jika akses pada situs Scimagomedia.com nama Tribunnews.com tidak terdeteksi, pada situs tersebut yang muncul adalah surabaya.tribunnews.com yang berada pada peringkat nomor enam.

Surabaya.tribunnews.com merupakan media online daerah yang berada dalam jaringan Tribunnews.com.

Konvergensi media memungkinkan penyatuan ruang redaksi cetak dan online yang bertujuan pada peningkatan efisiensi dan mengurangi biaya melalui spesialisasi dan keseragaman konten, selain itu juga bertujuan untuk menarik pengiklan terkait kemampuan distribusinya yang lebih luas. Keragaman tersebut berpengaruh terhadap bentuk preferensi media digital dalam keterlibatan, akses dan konstruksi budaya dalam ruang digital. Dampak lingkungan digital pada keragaman media mengungkapkan bahwa personalisasi dan fragmentasi secara signifikan mengarah pada konsumsi berita yang kurang beragam (Sun, G., 2023). Konvergensi media mendorong pengembangan media baru yang menyediakan kemudahan dalam mengaksesnya berkat adanya kemajuan teknologi digital yang memungkinkan audiens dapat mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya (Yang, L., 2023).

Tantangan dalam konvergensi media terkait dengan restrukturisasi manajemen dan tata kerja pada ruang redaksi selain jurnalis, teknologi, dan perusahaan media. Johannes Heru Margianto, *Managing Editor* Kompas.com menyatakan bahwa merupakan hal yang lazim terjadi jika antar media yang tergabung dalam satu payung manajemen akan saling berbagi berita atau konten (wawancara melalui sambungan telepon pada Kamis, 30 Mei 2024). Kompas.com tidak memungkiri bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diatasi dengan pemanfaatan konten dari Tribunnews.com ataupun dari media lainnya yang masih berada di bawah payung Kompas Gramedia Media Group (KG Media Group) dengan catatan wajib mencantumkan sumber asalnya dan disertai *link* berita. Meski demikian, walau KG Media Group merupakan Kelompok Kompas Gramedia (KKG), namun media di bawah KG Media Group seperti Kompas.com dan Tribunnews tidak diperbolehkan memanfaatkan berita dari Kompas.id atau koran Kompas.

Pada tanggal 19 Mei 2024 terjadi peristiwa penangkapan anggota Densus 88 yang diduga sedang menguntit Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Detasemen Khusus 88 (Densus 88) merupakan unit kontra-terorisme Polri yang memiliki kewenangan khusus terkait penanggulangan dan pemberantasan terorisme yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muhtar, Z., 2014). Secara yuridis Densus 88 dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 (Meinaky, R. & Fakhur, 2022). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Republik Indonesia (Puskeu.polri.go.id, 2017) menyatakan bahwa ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut, Pasal 23 ayat 1 Detasemen Khusus 88 Anti Teror disingkat Densus 88 AT merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme yang berada di bawah Kapolri. Selanjutnya dalam ayat 2 menyatakan bahwa Densus 88 AT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi, dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme.

Dalam peristiwa penguntitan Jampidsus, Densus 88 terbukti melakukan kegiatan spionase yang berpotensi melanggar UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, seperti yang diungkapkan oleh Nicky Fahrizal, pengamat keamanan dari Centre for Strategic and International Studies (Purnamasari, D. D., 2024). Tugas Densus 88 dalam tataran operasional berada di bawah UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bukan untuk

menguntit aparat hukum seperti yang terjadi dengan Kejaksaan Agung. Menurut Nicky, peristiwa tersebut memunculkan beragam spekulasi pertanyaan yang beredar di masyarakat: “Ada apa dengan Densus 88 dengan Kejaksaan Agung?”

Kejadian pada Minggu malam 19 Mei 2024 yang kemudian disusul dengan *show of force* dari aparat anggota Brigade Mobil (Brimob) pada Senin, 20 Mei 2024 pukul 23.00 WIB di depan gedung Kejaksaan Agung melintas mobil pengurai massa (raisa) Brimob diiringi sejumlah motor trail, pada saat itu pengamanan masih belum diperketat. Dodi Esvandi, *Content Vice Manager* Tribunnews.com menyatakan bahwa Tribunnews.com menjadi satu-satunya media yang berada di lokasi dan merekam peristiwa tersebut secara langsung (wawancara melalui sambungan telepon pada Kamis, 30 Mei 2024). Meskipun Tribun mendapatkan rekaman kejadian tersebut, namun Tribun tidak memilih langsung memberitakan hal tersebut karena belum adanya verifikasi dari pihak terkait. Upaya verifikasi telah dilakukan oleh reporter Tribun yang bertugas di Kejagung dan Mabes Polri, akan tetapi kedua pihak cenderung tertutup. Padahal dalam setiap kejadian yang terkait dengan penangkapan teroris biasanya Divisi Humas Mabes Polri akan mengeluarkan keterangan pers (Halim, D. & Wedhaswary, I. D., 2019). Kesulitan verifikasi ini yang membuat redaksi Tribun memilih untuk berhati-hati dalam pemberitaan. Meskipun demikian, Tribun terus mengawal peristiwa ini dan memilih menunda pemberitaan peristiwa yang terjadi, tentu dengan tetap melakukan upaya verifikasi. Pada beberapa kasus media online memiliki keunggulan untuk dapat cepat menginformasikan kepada khalayak atas semua peristiwa meskipun dengan data dan verifikasi yang minim, namun tidak semua media melakukan tindakan seperti tersebut. Masih banyak media online yang masih kuat memegang nilai-nilai jurnalistik dengan tetap melakukan verifikasi, tidak sekadar mengejar kecepatan sebuah informasi dengan mengabaikan verifikasi.

Peristiwa ini sedikit berbeda dengan kejadian-kejadian sebelumnya, misalnya peristiwa perseteruan antara KPK dan Polri (Sahid, A. A., 2015). Kasus Cicak vs Buaya menjadi perseteruan panjang antara dua lembaga yang mempunyai induk yang sama, yaitu kepolisian. Analogi Cicak vs Buaya diperkenalkan pertama kali oleh Komjen Susno Duadji (Detikcom, 2021). Kasus Cicak vs Buaya terjadi sebanyak 3 kali, yaitu pertama terjadi pada Juli 2009 yang berawal dari isu yang beredar terkait adanya dugaan penyadapan yang dilakukan KPK terhadap Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji yang terlibat pencairan dana dari nasabah Bank Century, Boedi Sampoerna. Puncak dari kasus Cicak vs Buaya jilid I adalah ketika Bareskrim Mabes Polri menahan dua Wakil Ketua KPK, yaitu Bibit Samad Riyanto dan Chandra Martha Hamzah.

Kasus Cicak vs Buaya jilid II terjadi pada awal Oktober 2012 dipicu oleh langkah KPK untuk mengusut kasus adanya dugaan korupsi alat simulator Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang menjerat mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Saat itu puluhan anggota Brimob mengepung gedung KPK pada hari Jumat malam tanggal 5 Oktober 2012, bertujuan untuk menangkap salah satu anggota penyidik KPK yang merupakan anggota Polri, Komisariss Novel Baswedan yang dituduh terlibat aksi penganiayaan berat ketika masih bertugas di Kepolisian Daerah Riau.

Sedangkan kasus Cicak vs Buaya jilid III terjadi pada Januari 2015 setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut dan sebagai balasannya kepolisian menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto untuk perkara rekayasa keterangan palsu saat menjadi pengacara dalam perkara Pemilukada tahun 2010. Kasus Cicak vs Buaya tersebut mengundang reaksi dan demonstrasi dari

masyarakat yang tergabung dalam aktivis antikorupsi yang melihat ada upaya pelemahan terhadap KPK. (Detikcom, 2021; Kompas.com, 2009; Trianita, L., 2015).

Berbeda dengan peliputan kasus Cicak vs Buaya yang berlangsung simultan dengan kejadian di lapangan, dalam kasus Densus 88 vs Kejaksaan Agung, Tribunnews.com baru memberitakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2024 berselang beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 24 Mei 2024 (Fadilla, A., 2024). Kejadian pada Selasa, 21 Mei 2024 semakin mencekam ketika sebuah drone melintas di atas gedung Kejaksaan Agung pada pukul 19.00 WIB, kemudian di pinggir lapangan dekat lapangan parkir Gedung Utama nampak bersiaga empat orang berbaju hitam lengkap dengan alat penembak drone. Pengamanan kompleks Kejaksaan Agung diperketat tidak seperti hari-hari biasanya karena adanya penambahan personel dari berbagai kesatuan TNI dan dua mobil Polisi Militer (PM) nampak terparkir di gerbang dalam. Kemudian dilaporkan pada pukul 22.40 WIB terlihat empat mobil hitam yang diduga milik Brimob melintas di depan gerbang Kejaksaan Agung. Begitu empat mobil yang diduga milik Brimob tersebut melintas, dua mobil Polisi Militer yang sebelum terparkir di sisi dalam gerbang kemudian bergerak maju ke sisi luar gerbang gedung Kejaksaan Agung.

Pemberitaan terkait perseteruan antara Densus 88 dan Kejaksaan Agung yang dimuat oleh media Tribunnews.com ada 76 buah dari tanggal 19 Mei 2024 - 3 Juni 2024 sejak konflik tersebut terjadi, sedangkan Kompas.com memuat 25 buah pemberitaan dari tanggal 19 Mei 2024 - 3 Juni 2024. Johanes Heru Margianto, *Managing Editor* Kompas.com, mengakui bahwa Kompas.com tertinggal dalam pemberitaan terkait penguntitan Densus 88 terhadap Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Heru menyatakan internal Kompas saat ini sedang fokus pada transformasi produk akhir berita berupa video yang menjadi tren saat ini. Beban transformasi yang sedang dilakukan tersebut menyita fokus reporter dan redaktur Kompas.com sehingga pemberitaan tentang penguntitan Densus 88 terhadap Jampidsus baru dimuat oleh Kompas.com pada Sabtu, 25 Mei 2024 pukul 10.12 WIB, selisih satu hari dibandingkan dengan Tribunnews.com (Tanuredjo, B., 2024).

Pada sisi lain, perseteruan antara Polri dalam hal ini Densus 88 dengan Kejaksaan Agung setelah lebih dari dua minggu mendapatkan reaksi dari masyarakat yang berbeda ketika terjadi peristiwa konflik Polri vs KPK. Reaksi masyarakat terhadap perseteruan antara KPK dengan Polri memunculkan keterbelahan sikap dengan sebagian besar mendukung KPK dan kritis terhadap Polri. Dalam media sosial Twitter (X) terbentuk dengan cepat opini publik yang menggambarkan bahwa KPK secara positif sedangkan polisi digambarkan negatif (Juditha, C., 2014). Hingga tanggal 3 Juni 2024 pemberitaan dari media Kompas.com dan Tribunnews.com masih seputar penjelasan terkait peristiwa tersebut, keterkaitan Jampidsus dengan masalah-masalah yang sedang ditangani olehnya, pemberitaan terkait Presiden Jokowi, dan pendapat dari DPR.

Media online Alinea.id menuliskan adanya kemungkinan friksi antara "Buaya vs Buaya" dalam kasus antara Polri dengan Kejaksaan Agung (Christian, I., 2024) karena belum adanya keterbukaan motif penguntitan oleh personel Densus 88. Baik Polri maupun Kejaksaan Agung belum membuka ke publik secara benderang terkait peristiwa tersebut. Publik hanya menduga adanya keterkaitan dengan penanganan kasus-kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung seperti yang banyak ditulis oleh media-media. Terkait dengan peristiwa penguntitan yang terjadi, Kompas.com menuliskan bahwa Komisi III DPR akan memanggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan klarifikasi terkait kejadian pada tanggal 19 Mei 2024 (Mantalean, V. & Ramadhan, A., 2024). Belum adanya konfirmasi resmi baik dari Kejaksaan Agung maupun Polri menjadikan isu-isu yang

beredar akan menjadi spekulasi yang berdampak kepada kepercayaan publik terhadap kedua lembaga negara tersebut.

4. KESIMPULAN

Media dalam melaksanakan kerja jurnalistiknya melewati proses perjalanan yang kompleks dan dinamis, melibatkan berbagai tahapan. Selain memenuhi unsur 5W+1H juga harus memiliki nilai berita sebagai standar dan ukuran yang digunakan oleh jurnalis untuk menentukan apakah suatu peristiwa layak diliput dan diberitakan. Untuk menjadikan jurnalisme yang bertanggung jawab dan berkualitas perlu dilakukan verifikasi. Sepenting apapun sebuah peristiwa jika belum bisa diverifikasi atau dikonfirmasi tentang kebenarannya, belum bisa layak disebut sebuah berita jika memakai perspektif jurnalisme yang bertanggung jawab (Araujo, J. R., et al., 2023). Jurnalis memainkan peran penting dalam menyaring informasi palsu dengan melakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan berita yang mereka laporkan. Jurnalisme investigasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik terkait masalah korupsi, mendorong media dapat memberikan informasi adanya penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi korupsi yang melibatkan oknum pada lembaga negara.

Peristiwa penguntitan Jampidsus oleh anggota Densus 88 terjadi pada 19 Mei 2024, namun baru diungkapkan ke publik oleh media pada 24 Mei 2024 karena adanya kesulitan dalam proses verifikasi. Kedua pihak yang bermasalah tidak memberikan informasi terkait peristiwa tersebut sehingga media masih menunda untuk memberitakan meskipun media mendapatkan informasi tersebut.

Adanya konflik kepentingan merupakan permasalahan yang kerap kali muncul di antara lembaga negara tersebut menunjukkan komunikasi dan koordinasi yang belum terjalin dengan baik. Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga negara, perlu diterapkan sistem manajemen kinerja dan transparansi yang melibatkan pejabat pemerintah terkait berbagai layanan publik yang diberikan belum bisa memenuhi harapan publik (Sudaryati, E. & Nugraha, D., 2020). Maraknya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah oknum pejabat dalam internal kedua lembaga tersebut menimbulkan permasalahan yang harus segera dicari solusi untuk mencegah terulang kembali.

Media memiliki andil dalam mengungkap dan menyebarkan informasi terkait lembaga-lembaga negara untuk menumbuhkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi (Wanna, J. & Vincent, S., 2018). Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam proses ini karena kemampuan media untuk mengekspos praktik korupsi yang terjadi dengan harapan mampu memperbaiki tata kelola lembaga negara. Pemerintahan yang transparan sangat penting dalam pelaporan media karena memungkinkan jurnalis mampu menjalankan kerja-kerja jurnalistik sebagai bagian dari kontrol kepada pemerintah karena pers sebagai pilar keempat demokrasi. Selain itu, transparansi dalam pemerintahan dapat membantu menegakkan hak publik untuk mengetahui dan memastikan bahwa jurnalis dapat meminta pertanggungjawaban dan melayani kepentingan masyarakat secara efektif (Choi, J. J. & Sami, H., 2012).

5. REFERENCES

Buku

- Choi, J. J. & Sami, H. (2012). *Transparency and Governance in a Global World. International Final Review*, Vol. 13. Bingley: Emerald Group Publishing Company.
- Wanna, J. & Vincent, S. (2018) *Opening Government: Transparency and engagement in the information age*. doi: 10.22459/OG.04.2018. Canberra: ANU Press.

Jurnal

- Abrar, M. F., Khan, M. S., Khan, I., Ali, G., Shah, S. (2023). *Digital Information Credibility: Towards a Set of Guidelines for Quality Assessment of Grey Literature in Multivocal Literature Review*. Applied Sciences, doi: 10.3390/app13074483
- Alzubi, A. M. (2022). *Impact of New Digital Media on Conventional Media and Visual Communication in Jordan*. Journal of Engineering, Technology and Applied Science, doi: 10.36079/lamintang.jetas-0403.383
- Araujo, J. R., Martelo, T. R., Pedreira, J. F. (2023). *Disinformation and Verification in a Digital Society: An Analysis of Strategies and Policies Applied in the European Regional TV Broadcasters of the CIRCOM Network*. Societies, doi: 10.3390/soc13040081
- Baugut, P. (2019). *From Interactions to the Mediatization of Politics. How the Relationships Between Journalists and Political Actors Explain Media Influences on Political Processes and the Presentation of Politics*. Journalism Studies, doi: 10.1080/1461670X.2019.1598886
- Besman, A., Hidayat, D. R., Bajari, A., Moosmüller, A. (2023). *Communism Issues in Kompas Daily, Transformation from the Old Order to the New Order Era*. Journal of Hunan University Natural Sciences, doi: 10.55463/issn.1674-2974.50.1.11
- Davies, S., Stone, L., Buttle, J. (2016) *Covering Cops: critical reporting of Indonesian police corruption*. Pacific Journalism Review, doi: 10.24135/PJR.V22I2.61
- Dwinarko, Sjafrizal, T., Muhamad, P., Akbar, M. R. (2023). *Actors Distortion of News Agencies Framing Surveys in Online Mass Media about Political Parties Bearer Presidential-Candidates 2024*. DOI: <https://doi.org/10.46799/jss.v4i1.507>
- García, J. A. G. & Agudelo, C. A. M. (2023). *Social responsibility in the practice of decent work. Visión de Futuro*, doi: 10.36995/j.visiondefuturo.2023.27.02.005.en
- Hao, X. (2022). *Analysis of the Characteristics of Agenda Setting Theory in the New Media Era*. Journal of Humanities and Social Sciences Studies, doi: 10.32996/jhsss.2022.4.3.21
- Harutyunyan, R. (2022). *Qualitative-quantitative study of media political discourse from the perspective of manipulation*. Armenian Folia Anglistika, doi: 10.46991/afa/2022.18.2.042
- Juditha, C. (2014). *Opini Publik Terhadap Kasus “KPK Lawan Polisi” dalam Media Sosial Twitter*. doi: 10.30818/JPKM.2014.1170201
- Khadziq (2016). *Konvergensi Media Surat Kabar Lokal (Studi Deskriptif Pemanfaatan Internet Pada Koran Tribun Jogja dalam Membangun Industri Media Cetak Lokal)*. doi: 10.14421/PJK.V9I1.1187
- Ponce, O. A., Galan, J. G., Maldonado N. P. (2022). *Qualitative Research in Education*. International Journal of Educational Research and Innovation, doi: 10.46661/ijeri.5917

- Kasirye, F. (2021). *The Importance of Needs in Uses and Gratification Theory*. doi: 10.31124/ADVANCE.14681667.V1
- Ihlebaek, K. A. & Figenschou, T. U. (2023). *Journalism as a Strategic Action Field: How to Study Contestations and Power Dynamics between Professional Journalism and Its Challengers*. *Digital journalism*, 1-18. doi: 10.1080/21670811.2023.2214901
- Jamil, A., & Doktoralina, C. M. (2016). *The Save KPK Movement: A Framing Analysis of Coverage in Indonesian News Media Surrounding the KPK and Police Dispute*. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, doi: 10.5901/MJSS.2016.V7N3S1P229
- McLachlan, K. (2022). *The Impact of Digitalization*. doi: 10.1007/978-3-030-86884-0_30
- Meinaky, R. & Fakhlur (2022). *Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror dalam Menangani Aksi Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Vol. 10, No. 2 *Jurnal Ilmiah Publika*.
- Megayatma, A. D. & Pratiwi, D. R. (2022). *Kohesi gramatikal dan leksikal teks berita pembelajaran tatap muka pada media sosial kompas.com*. *Fon*, doi: 10.25134/fon.v18i2.5447
- Portilla, I. (2018). *Contributions of academic articles to the practice of journalism and data management*. *The Observatory*, doi: 10.15847/OBSOBS12320181245
- Sahid, A. A. (2015). *Konflik KPK vs Polri Jilid III: kontestasi kuasa dalam penegakan hukum di Indonesia*. doi: 10.15575/AS.V18I1.655
- Sasongko, A. K. (2022). *Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum)*. *Parental: Jurnal Hukum dan Budidaya*, doi: 10.20961/jolsic.v10i2.64943
- Salubi, O. G. & Muchaonyerwa, N. (2018). *Uses and Gratifications of the Internet and Library Information Resources: An Integrated Model Proposal*. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, doi: 10.14429/DJLIT.38.6.13281
- Sun, G. (2023). *Diversity of News Consumption in a Digital Information Environment*. doi: 10.5463/thesis.165
- Sudaryati, E. & Nugraha, D. (2020). *Pengaruh Karakteristik Manajemen Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah*. doi: 10.20473/BAKI.V4I2.16966
- Guran, M. S., & Ozarslan, H. (2022). *Framing Theory in the Age of Social Media*. *Selçuk Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi*, doi: 10.52642/susbed.1142562
- ASSURED-UAM, Project. (2022). *Foreign news and public opinion: attribute agenda-setting theory revisited*. doi: 10.31390/gradschool_theses.281
- Yang, L. (2023). *Reform of News Communication and News Education under Media Convergence*. *Media and Communication Research*, doi: 10.23977/mediacr.2023.040109
- Tsang, E. P. K. (2023). *A Qualitative Research Approach is an Inevitable Part of Research Methodology: An Overview*. *International Journal For Multidisciplinary Research*, doi: 10.36948/ijfmr.2023.v05i03.3178

Artikel di Internet

- Chaterine, R. N. & Krisiandi (2022). <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/31/16170511/kadiv-propam-usul-ada-riset-cari-penyebab-konflik-tni-polri>
- Christian, I. (2024). <https://www.alinea.id/nasional/potensi-friksi-buaya-vs-buaya-dalam-kasus-penguntitan-febrie-b2k8k9PXj>

- Detikcom (2021). <https://news.detik.com/berita/d-5561874/mencuat-lagi-cicak-vs-buaya-di-tubuh-kpk-begini-sejarahnya?single=1>
- Dzulfaroh, A. N. & Hardiyanto, S. (2021). <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/06/203500465/menilik-kasus-jaksa-pinangki-yang-penuh-kontroversi?page=all>
- Fadilla, A. (2024). <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/05/24/selasa-mencekam-di-kejaksaan-agung-drone-melintas-hingga-mobil-pm-dan-brimob-saling-berhadapan?page=all>
- Halim, D. & Wedhaswary, I. D. (2019). <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/18/03080011/ketika-terduga-teroris-menyambangi-mabes-polri>
- Purnamasari, D. D. (2024). <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/24/jampidsus-diduga-dikuntit-densus-88-pengamat-keamanan-melanggar-uu-pemberantasan-terorisme>
- Puskeu.polri.go.id (2017). <https://puskeu.polri.go.id/upload/pdf/20210430134336-myGNJZ4Q KK.pdf>
- Putri, V. K. M. & Gischa, S. (2021). <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/24/154450669/kejaksaan-republik-indonesia-peran-tugas-wewenang-dan-fungsinya>
- Kompas.com (2009). <https://nasional.kompas.com/read/2009/11/03/05305043/kepala-polri-itu-pernyataan-oknum?page=2>
- Mantalean, V. & Ramadhan, A. (2024). <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/27/15185211/komisi-iii-akan-panggil-kapolri-dan-jaksa-agung-untuk-klarifikasi-isu>
- Nababan, W. M, C. dan Rahayu, K.Y. (2024). <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/27/penguntitan-jampidsus-spekulatif-komisi-iii-dpr-bakal-panggil-pihak-terkait>
- Saptohutomo, A. P. (2023). <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/27/17115441/survei-indikator-ungkap-kejugung-dipercaya-publik-karena-konsisten-usut>
- Setuningsih, N. (2024). https://nasional.kompas.com/read/2024/05/26/08343391/profil-jampidsus-febrie-ardiansyah-yang-diduga-dikuntit-anggotadensus88?debug=1&lgn_method=google&google_btn=onetap
- Semrush.com (2024). <https://www.semrush.com/website/top/indonesia/all/>
- Scimagomedia.com (2024). <https://www.scimagomedia.com/rankings.php?country=Indonesia>
- Wardhani, I. S. (2015). <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/02/16590421/Mencari.Penyelesaian.Konflik.KPK-Polri>
- Yahya, A. N. (2024). <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/27/11224581/kejugung-dijaga-polisi-militer-imbis-densus-88-buntuti-jampidsus-ini-dasar>
- Kompas.com (2017). <https://vik.kompas.com/sejarah-kompascom/menu-2.html>
- Tanuredjo, B. (2024). <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/25/10120891/densus-88-kuntit-jam-pidsus-hari-hari-penuhtanya?page=all%20%20%20%2025/05/2024,%2010:12%20WIB>
- Trianita, L. (2015). <https://nasional.tempo.co/read/637080/aktivis-gelar-aksi-save-kpk-muncul-demo-tandingan>